

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
2. Mendorong Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target

kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusunlah LKj Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara, khususnya sebagai upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran.

Tujuan dan Manfaat

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis 2021-2026 sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Jambi, khususnya LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan sebagai penyajian data realisasi, baik data mengenai target maupun realisasi kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan Masyarakat). Kedua,

merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Kedudukan dan Dasar Hukum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

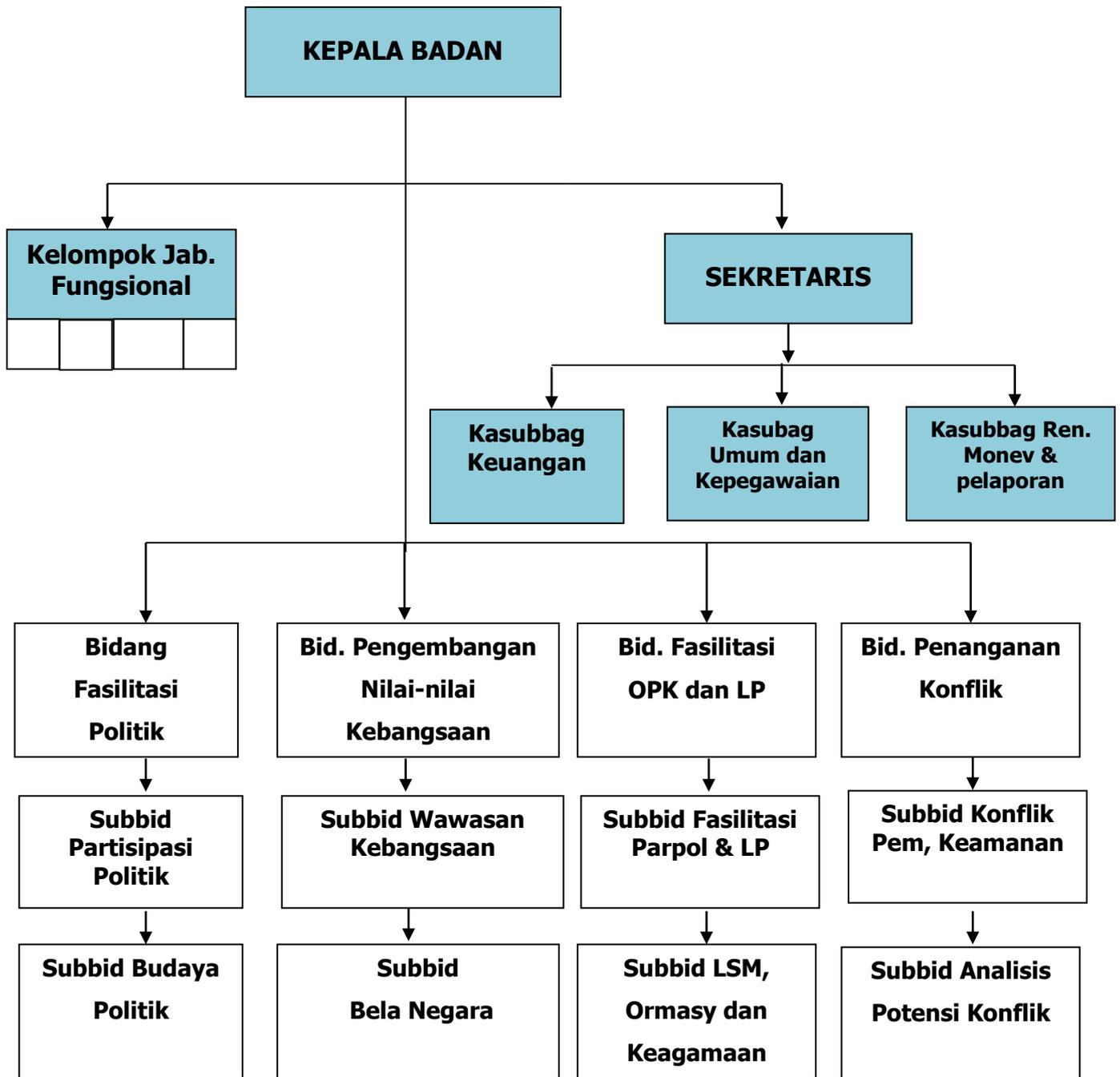
1.1 Struktur Organisasi

Sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Yaitu :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Partisipasi Politik.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.
- d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan.
- e. Bidang Penanganan Konflik.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2008**



1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2008 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, maka tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 mengatur bahwa Sekretaris dan 4 (empat) Bidang sebagaimana yang tertera dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008, masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi. Untuk dapat melaksanakan Tupoksi dimaksud, secara struktural dibantu oleh beberapa Sub Bagian/Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Membuat perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - c. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;

- d. Mengelola perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan surat menyurat tata usaha pimpinan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, barang, perawatan dan pemeliharaan Inventaris Kantor;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas dan keamanan kantor;
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan Badan Kesbangpol;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Menyiapkan usulan pengangkatan bendaharawan;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2 Sub Bagian Keuangan.

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana anggaran;
 - b. Melaksanakan penanganan administrasi keuangan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - d. Melaksanakan urusan kas dan gaji;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3 Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- (1) Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program dan penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, meng sistimasi kan data dan penyusun rencana serta program kerja;
 - b. Menganalisa data hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan;
 - c. Menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas Badan Kesbangpol;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Bidang Partisipasi Politik

- (1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Kesbangpol di bidang Fasilitasi dan pengembangan, Partisipasi politik dan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi Pemilihan Umum;
 - c. Menyiapkan perumusan kebijakan komunikasi politik dan Sosialisasi Undang-undang politik;
 - d. Merumuskan kebijakan pengembangan etika politik, pendidikan politik;
 - e. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Partisipasi Politik Terdiri dari :

2.1 Sub Bidang Partisipasi Politik

- (1) Sub Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan partisipasi politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi pemilihan umum dan pilkada;
 - c. Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sub Bidang Budaya Politik

- (1) Sub Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang budaya politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kerja tentang komunikasi politik dan sosialisasi Undang-undang politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan etika politik dan pendidikan politik;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan budaya politik;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perkuatan pengembangan wawasan kebangsaan, memfasilitasi dan pembinaan pembauran bangsa, meningkatkan kesadaran bela negara serta resapan ideologi Negara di kalangan masyarakat dalam rangka tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
 - b. Melaksanakan dan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di lingkungan masyarakat;
 - c. Melakukan peningkatan dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - d. Melakukan pemasyarakatan pembauran kebangsaan dalam rangka integrasi masyarakat;

- e. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam proses penyiapan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bela negara;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :

3.1 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan kewarganegaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - b. Melaksanakan kegiatan interaksi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pembauran dan perekonomian;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2 Sub Bidang Bela Negara

- (1) Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bela negara, ideologi dan kewaspadaan Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bela Negara mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara;
 - b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan ideologi dan kewaspadaan nasional;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan.

- (1) Bidang fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan fasilitasi organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan, memfasilitasi dan pengawasan terhadap organisasi partai politik, kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi dan kemasyarakatan;
 - c. Melakukan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
 - d. Melakukan evaluasi, komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait organisasi politik, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
 - e. Memfasilitasi lembaga perwakilan;
 - f. Melakukan sosialisasi kebijakan peraturan organisasi kemasyarakatan dan politik;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan terdiri dari :

4.1 Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan kebijakan perumusan dan fasilitasi partai politik dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga perwakilan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan persiapan kebijakan perumusan fasilitasi partai politik, organisasi profesi dan lembaga perwakilan;
 - b. Melakukan kerja sama, komunikasi, konsultasi dengan parpol;
 - c. Melakukan evaluasi pengawasan berkaitan dengan kegiatan partai politik;

- d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
- e. Mengumpulkan, mengolah data yang berhubungan dengan organisasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2 Sub Bidang Organisasi Masyarakat , LSM dan Keagamaan.

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi dan pengembangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang organisasi keagamaan dan Lembaga swadaya masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
 - b. Melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penanganan Konflik

- (1) Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesbangpol di bidang penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan analisis potensi konflik;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan konflik;
 - c. Melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari kegiatan sosial, ekonomi, dan lalu lintas orang asing;

- d. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintah;
- e. Melaksanakan evaluasi, koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam memelihara stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :

5.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik

- (1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan yang menyangkut kebijakan fasilitas analisis potensi konflik, fasilitasi rekonsiliasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Potensi Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan fasilitasi, analisis potensi konflik yang bersumber dari kerawanan sosial;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dengan penanganan berbagai konflik sosial;
 - c. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.2 Sub Bidang Konflik Pemerintah dan Keamanan

- (1) Sub bidang konflik pemerintahan dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik pemerintahan dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan keamanan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan kebijakan memfasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat konflik pemerintahan dan keamanan.
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;

- c. Melaksanakan rekonsiliasi mentalitas masyarakat secara utuh guna menumbuh kembangkan kembali semangat kebersamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Melakukan evaluasi dan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, dijumpai beberapa permasalahan berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa, Wilayah Provinsi Jambi terdiri dari Masyarakat yang Heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik Nasional yang terjadi sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di Provinsi Jambi.

Isu-isu strategis yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Dukungan Persiapan Pelaksanaan Pilkada & Pemilu Serentak Tahun 2024.
2. Iklim politik Nasional yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak, menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme yang berimbas ke Provinsi Jambi.
3. Meningkatnya aksi penyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila dan antisipasi bahaya aksi terorisme dan radikalisme di daerah Provinsi Jambi.
4. Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkannya pendidikan politik masyarakat terutama pada pemilih pemula;
5. Fasilitasi bagi Parpol, LSM, Ormas dan Nirlaba yang merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim, yang mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif lambat.
6. Melemahnya Pemahaman Terkait Nilai-nilai Pancasila, Karakter & Wasbang dlm Kehidupan Berbangsa, Bernegara & Bermasyarakat.
7. Meningkatnya konflik sosial terutama konflik sengketa lahan di daerah Provinsi Jambi;

1.4. Sumber Daya Aparatur

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak (tujuh puluh tiga) orang. 51 (lima puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 32 (tiga puluh dua) orang tenaga honorer, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural 17 Orang.
2. Staf/Pelaksana 34 Orang.
3. Tenaga Honorer 32 Orang.

Secara keseluruhan komposisi jabatan, memuat susunan Struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Eselon I = - Orang
2. Eselon II = 1 Orang
3. Eselon III = 5 Orang
4. Eselon IV = 11 Orang
5. Non Eselon = 28 Orang

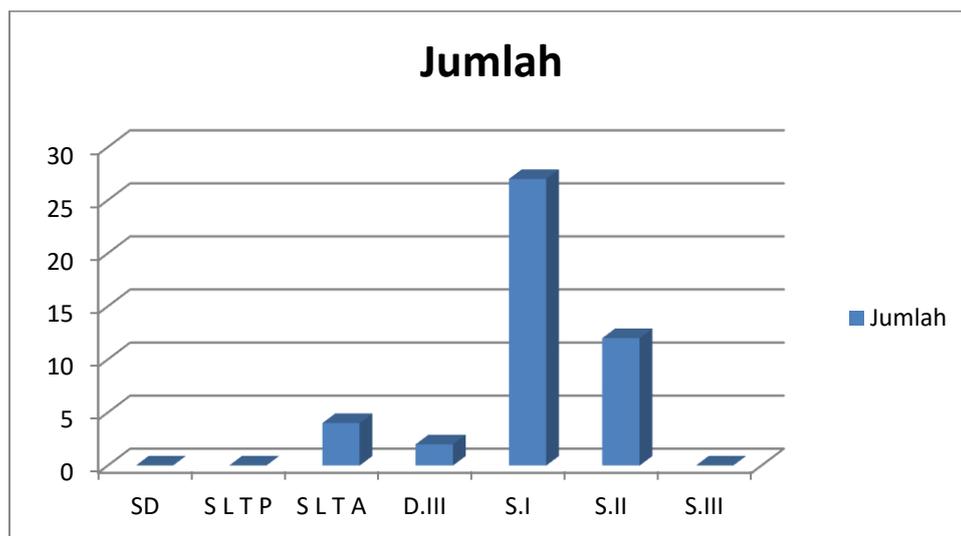
Tabel 1.1
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Tingkat Pendidikan

No	2023	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	SD	-	-	-
2	S L T P	-	-	-
3	S L T A	4 Orang	8,9 %	PNS Daerah
4	D.III	2 Orang	4,4 %	PNS Daerah
5	S.I	27 Orang	60 %	PNS Daerah
6	S.II	12 Orang	26,7 %	PNS Daerah
7	S.III	-	-	-
	Jumlah	45 Orang	100%	

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2023

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol 60% pegawai sudah berpendidikan sarjana (S1), bahkan 26,7% lulusan Pasca Sarjana (S2) dan 4,4% Diploma, namun sebanyak 8,9% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 1.2
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Tingkat Pendidikan



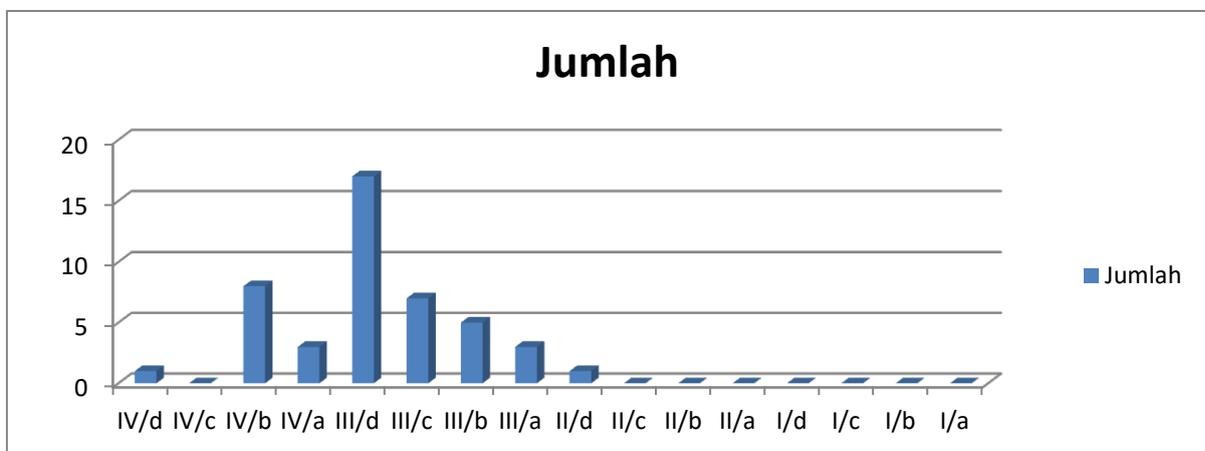
Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	I.c	-	-	-
4	I.d	-	-	-
5	II.a	-	-	-
6	II.b	-	-	-
7	II.c	-	-	-
8	II.d	1 Orang	2,2 %	PNS Daerah
9	III.a	3 Orang	6,67%	PNS Daerah
10	III.b	5 Orang	11,11%	PNS Daerah
11	III.c	7 Orang	15,56%	PNS Daerah
12	III.d	17 Orang	37,78%	PNS Daerah
13	IV.a	3 Orang	6,67%	PNS Daerah
14	IV.b	8 Orang	17,78%	PNS Daerah
15	IV.c	-	-	-
16	IV.d	1 Orang	2,22%	PNS Daerah
17	IV.e	-	-	-
	Jumlah	45 Orang	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2023

Gambar 1.3
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Berdasarkan Golongan Ruang



1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan juga didukung oleh sumber daya sarana dan prasarana yang memadai, seperti tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Rekapitulasi Barang Inventaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
(data Desember 2023)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				B	KB
I	Tanah dan Bangunan		M2		
II	KENDARAAN :				
	1.Roda 2	12	UNIT	12	
	2.Roda 4	7	UNIT	7	
III	APK :				
	1.Lemari Kayu	24	BUAH	24	
	2.Filling Kabinet	15	BUAH	15	
	3.Papan Tulis	4	BUAH	4	
	4.Kursi Putar	25	BUAH	25	
	5.Kursi Biro	35	BUAH	35	
	9.Meja Biro	42	BUAH	42	
	10.Meja ½ Biro	55	BUAH	55	
	11.Televisi	7	UNIT	7	
	12.Bagan Struktur	1	BUAH	1	
	13.Komputer (PC)	28	UNIT	28	
	14.Laptop	24		24	
	15.AC	64	UNIT	64	
	16.Infocus	2	UNIT	2	
	17.Printer	25	UNIT	25	

Sumber : Data Inventaris Barang Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2023

Tabel 1.4
Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini		Jumlah Rencana Pengadaan	Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	KB	2022	
1	AC 2 Pk	19	8	1	
2	AC 1 Pk	25	10	1	
3	Filling Kabinet	8	7	-	
4	Kursi Kantor	23	12	8	
5	Pc Al In One	22	6	2	
6	Laptop	19	5	2	
7	Printer G4010	8	3	1	
8	Printer Epson	9	3	1	

Sumber : Data Inventaris Barang Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2023

Tabel 1.5
Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini		Jumlah Rencana Pemeliharaan 2023	Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	KB		
1	Minibus	12	7	8	
2	Bangunan/Gedung Kantor	560 m2	356 m2	916 m2	
3	AC	44	18	62	
4	PC (Komputer)	22	6	28	
5	Printer	17	6	23	

Sumber : Data Inventaris Barang Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2023

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi)

guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi pada tahun 2023 berasal dari APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 31.728.494.193,- yang selanjutnya mengalami perubahan yang tertuang dalam DPA Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.378.640.807,- (Seratus Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah). Yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sebesar Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 7.544.477.572,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 15.971.102.375,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
3. Belanja Hibah Rp.78.128.683.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 234.377.860,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
5. Belanja Modal Gdug dan Bangunan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan.

1.7 Sistematika Penyusunan LKj Tahun 2023

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan berdasarkan data hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2023, dan sesuai dengan Selain itu laporan ini bersumber dari pembiayaan yang bersifat Strategik yang dimaksudkan adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategik dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sementara itu dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tetapi tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2023 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas gambaran tentang latar belakang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, tugas pokok dan fungsi dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Kesbangpol Provinsi Jambi seperti tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi Kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA, Menjelaskan Ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun 2022, penyajian tabel perjanjian kinerja perangkat daerah. Perbedaan antara target kinerja pada renja tahun 2022 dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA, Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selama Tahun 2023 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode

tersebut serta menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk tahun 2023.

BAB IV – PENUTUP, Menjelaskan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 atas capaian kinerjanya serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jambi merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik, perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan visi dan misi serta mempertahankan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategik yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran. Program dan Kegiatan disusun secara sistimatis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan kesatuan dan politik Provinsi jambi. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, inofatif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan suatu pernyataan mengenai gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai di masa depan suatu instansi pemerintah untuk dapat berkarya,tetap konsisten dan eksis, antisipasif, inovatif dan produktif untuk menujucita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2021 – 2026 adalah :

Visi :

**“TERWUJUDNYA JAMBI LEBIH MAJU, AMAN, NYAMAN,
TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO
ALLAH SWT, (JAMBI MANTAP)”**

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 antara lain:

MISI PERTAMA : Memantapkan Tata Kelola Pemerintah

Yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

MISI KEDUA : Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah Yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan local untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

MISI KETIGA : Memantapkan Kualitas SDM

Yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Ketiga misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Ketiga** Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu : **“Mantapkan Kualitas SDM”**

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi tersebut di atas serta memecahkan permasalahan dalam menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026, yaitu : ”Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang dinamis”

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Visi : Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridha Allah SWT.			
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintah			
Misi 3 : Memantapkan kualitas SDM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis	Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis	Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan.	Revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh Agama, Masyarakat dan pemerintah.

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Pada tabel diatas, telah tergambar dengan jelas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dijelaskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Misi 3 : yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kerukunan intra dan antar umat beragama, Indeks Aspek Kebebasan Sipil serta penguatan rencana aksi gangguan keamanan dalam Provinsi Jambi.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berikut target capaian selama 5 (lima) Tahun.

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Terwujudnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif	Indeks Aspek Hak-hak Politik	57,3	60,59	63,88	67,17	70,46	73,75
		Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	87,95	89,95	92,45	94,95	97,45	97,45

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi telah menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs.H.APANI SAHARUDIN**
Jabatan : **Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**
Jabatan : **Gubernur Jambi**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Maret 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.


Drs.H.APANI SAHARUDIN
Pembina Utama Madya
NIP.19680603 198810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya situasi politik daerah yang kondusif	Indeks aspek hak-hak politik	60,88 %
2.	Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis	Indeks aspek kebebasan sipil	92,45 %
3.	Terwujudnya pelayanan, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A (80)

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 10,137,886,405	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 11,146,495,402	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 5,638,291,340	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1,853,703,906	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Peningkatan	Rp. 519,558,140	APBD

Program	Anggaran	Keterangan
6. Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 2,432,559,000	APBD
Jumlah	Rp. 31,728,494,193	APBD

Gubernur Jambi,
Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi,
Drs.H.APANI SANARUDIN
Pembina Utama Madya
NIP.19680603 198610 1 001

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Dapat dijelaskan tidak ada perbedaan antara target kinerja pada Renja tahun 2023 dengan yang di Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Tahun 2023.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	5	6	7	8
1.	Meningkatnya situasi politik daerah yang Kondusif dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat.	Persentase partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	70,50 %	70,50 %	100 %	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kehidupan Demokrasi yang dinamis.	-Indeks Kebebasan Sipil -Persentase Ormas aktif -Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi	70 % 50 % 60 %	70 % 50 % 60 %	100 % 100 % 100 %	Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
3.	Meningkatnya pelayanan, akuntabilitas kinerja dan keuangan	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 % BB	85 % BB	100 % 100 %	Sangat Baik Sangat Baik

Sumber : Badan Kesbangpol 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Jambi memiliki indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi . Pada tahun 2023, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai 100%**) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 100 %.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2023, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Badan Kesbangpol Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 100 %. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatnya situasi politik daerah yang Kondusif dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

Dengan indikator kinerjanya yakni Persentase partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja 2020-2023

No.	Indikator	Capaian			Capaian 2023		
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	70,46 %	70,50 %	70,50 %	70,50 %	70,50 %	100 %
2.	-Indeks Kebebasan Sipil -Persentase Ormas aktif -Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi	70 % 50 % 60 %	100 % 100 % 100 %				
3.	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 % BB	85 % BB	85 % BB	85 % BB	85 % BB	100 % 100 %

Sasaran ini dicapai melalui Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1. Sosialisasi Undang-undang Politik.
2. Rapat Internal.
3. Rapat Tim Verifikasi.
4. Rapat Koordinasi Bidang Politik.

Sasaran #2: Meningkatnya kehidupan Demokrasi yang dinamis. Dengan indikator kinerjanya yakni ;

- Indeks Kebebasan Sipil
- Persentase Ormas aktif

- Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi

Sasaran ini dicapai melalui Program-Program :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 6) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.4 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

No	Indikator	Awal Periode RPJMD 2021	CAPAIAN			TARGET 2023	Capaian s/d 2023 thd Target 2024 %
			2020	2021	2022		
1.	Indeks Kebebasan Diskriminasi	93,47	93,47	93,47	93,60	93,60	90 %
2.	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3.	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75 %	75 %	75 %	85 %	90 %	91 %
4.	Persentase Pelaksanaan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	76 %	76 %	76 %	76 %	79 %	80 %
5.	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	78 %	78 %	78 %	78 %	80 %	82 %
6.	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	77 %	77 %	77 %	77 %	79 %	80 %
7.	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	85,5%

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 31.728.494.193,- yang selanjutnya mengalami perubahan tertuang dalam DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar Rp. 102.378.640.807,- (Seratus Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 7.544.477.572,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 15.971.102.375,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
3. Belanja Hibah Rp.78.128.683.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 234.377.860,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
5. Belanja Modal Gdung dan Bangunan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Realisasi Anggaran secara keseluruhan **Rp 100.861.172.552 (98,52%)**.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2023

NO	URAIAN (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		TARGET KINERJA		REALISAS I CAPAIAN KINERJA		KET
			2023	%	Jumlah	Satuan	2023	%	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	<i>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</i>								
	<i>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.037.947.603	9.624.263.358	96	100	%	100	100	EFISIEN
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.246.220	206.377.579	100	100	%	100	100	EFISIEN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.736.500	45.886.173	98	11	dokumen	11	100	EFISIEN

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	160.509.720	160.491.406	100	12	lap	12	100	EFISIEN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.387.707.572	6.991.788.635	95	100	%	100	100	EFISIEN
	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.238.857.572	6.842.946.875	95	14	bulan	14	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148.850.000	148.841.760	99,99	12	bln	12	100	EFISIEN
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.500.000	38.500.000	100	10	Org	10	100	EFISIEN
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.500.000	38.500.000	100	10	Org	10	100	EFISIEN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	631.520.481	631.067.264	99,93	100	%	100	100	EFISIEN
	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	172.385.781	171.935.881	99,74	12	bln	12	100	EFISIEN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.244.600	51.243.100	100	12	bln	12	100	EFISIEN

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.600.500	60.600.500	100	12	bln	12	100	EFISIEN
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	100	12	media cetak	12	100	EFISIEN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.289.600	338.287.783	100	1	thn	1	100	EFISIEN
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.377.860	232.167.600	99,06	21	unit	100	100	EFISIEN
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.377.860	232.167.600	99,06	21	unit	21	100	EFISIEN
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.422.670	365.102.053	99,10	1	thn	1	100	EFISIEN
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5.000.000	100	1	thn	1	100	EFISIEN
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	176.008.548	173.666.123	98,67	1	thn	1	100	EFISIEN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.414.122	186.435.930	99,48	1	thn	1	100	EFISIEN
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.170.172.800	1.159.260.227	99,07	1	thn	1	100	EFISIEN

	Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.809.600	351.060.317	97,57	1	thn	1	100	EFISIEN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.139.600	109.071.050	100	1	thn	1	100	EFISIEN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	701.223.600	699.128.860	99,70	12	bln	12	100	EFISIEN
II	<i>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</i>	9.623.944.150	8.680.211.262	90,19	79	%	79	100	EFISIEN
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	9.623.944.150	8.680.211.262	90,19	100	%	100	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	3.691.016.987	3.670.005.648	99,43	210	peserta	210	100	EFISIEN

	Kebangsaan								
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.823.680.008	4.901.574.831	84,17	9	kab/kota	9	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	109.247.155	108.630.783	99,44	9	kab/kota	9	100	EFISIEN
III	<i>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA</i>	<i>78.438.123.004</i>	<i>78.434.008.454</i>	<i>99,99</i>	<i>79</i>	<i>%</i>	<i>79</i>	<i>100</i>	EFISIEN

	SERTA BUDAYA POLITIK								
9	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	78.438.123.004	78.434.008.454	99,99	100	%	100	100	EFISIEN
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	78.111.801.000	78.111.801.000	100	80	peserta	80	100	EFISIEN

04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	291.481.764	289.121.972	99,19	6	kab/kota	6	100	EFISIEN
05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.840.240	33.085.482	94,96	6	kab/kota	6	100	EFISIEN
IV	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</i>	<i>1.680.000.000</i>	<i>1.650.930.920</i>	<i>98,27</i>	<i>90</i>	<i>%</i>	<i>90</i>	100	EFISIEN

10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.680.000.000	1.650.930.920	98,27	95	%	95	100	EFISIEN
	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	112.932.586	112.919.800	99,98	168	ormas	168	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.482.986.834	1.454.980.584	98,11	60	ormas	60	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	84.080.580	83.030.536	98,75	53	Ormas	53	100	EFISIEN

V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	331.067.050	330.045.550	99,69	90	%	90	100	EFISIEN
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	331.067.050	330.045.550	99,69	20	%	20	100	EFISIEN
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.389.660	74.869.190	99,31	8	Program Kerja	8	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	255.677.390	255.176.360	99,80	12	dokumen	12	100	EFISIEN

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	<i>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</i>	2.267.559.000	2.141.713.008	94,45	80	%	80	100	EFISIEN
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.267.559.000	2.141.713.008	94,45	100	%	100	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	720.380.700	718.602.568	99,75	11	dokumen	11	100	EFISIEN

	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	340.160.000	340.143.202	99,99	11	kab/kota	11	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	246.555.500	146.531.438	59,43	8	kasus	8	100	EFISIEN

	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	960.462.800	936.435.800	97,50	12	%	12	100	EFISIEN
JUMLAH		102.378.640.807	100.861.172.552	98,52				100	EFISIEN

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel di atas, kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah sesuai target, dengan tingkat efisiensi sebesar 100 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian strategis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

3.4 Laporan Hasil kegiatan dan Realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2023

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan pada Renstra Tahun 2021-2026, Indikator kinerja tersebut beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya Tahun 2023 dapat diuraikan dibawah ini :

Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome* antara yang direncanakan dengan realisasinya atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik Renstra Tahun 2021-2026 Indikator kinerja sasaran strategik beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya diuraikan dibawah ini :

I. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan pembinaan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan semakin meningkat, adanya hubungan kemitraan dan fasilitasi antara pelajar, tokoh agama dan tokoh

masyarakat, dimana dalam hubungan kemitraan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dalam target indikator kinerja. Dana yang menunjang program ini bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar **Rp. 9.623.944.150,-**. Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.680.211.262,-** dengan Kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Pelaksanaan kegiatannya berupa :

1. Kegiatan Sosialisasi Pemantapan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda, Ormas, OKP, Tokoh Adat, Tomasy dan Organisasi Wanita di Kabupaten/kota Tahun 2023.
2. Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Hasil yang dicapai :

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah Generasi Muda, Ormas, OKP, Tokoh Adat, Tomasy dan Organisasi Wanita di Kab/Kota berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) titik di wilayah Provinsi Jambi, yang terdiri dari :

- a. Kota Jambi = 32 titik
- b. Kab. Kerinci = 24 titik
- c. Kab. Sarko = 17 titik
- d. Kab. Batanghari = 15 titik
- e. Kab. Tanjung Jabung Barat = 16 titik

- f. Kab. Tanjung Jabung Timur = 4 titik
- g. Kab. Tebo = 16 titik
- h. Kab. Muaro Jambi – 18 titik
- i. Kab. Merangin 25 titik

Sasaran peserta yang sudah mendapatkan sosialisasi sebanyak 16.100 peserta.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan adalah, menumbuhkan kebanggaan rasa cinta tanah air pada generasi muda, sehingga membentuk pribadi yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya dan juga diharapkan dapat para generasi muda dapat lebih mengerti tentang ideologi pancasila.

Perkembangan yang terjadi di sekitar anak bangsa kita, bisa saja menipiskan atau bahkan menghilangkan rasa cinta tanah air, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi guna mengingatkan kembali pentingnya Wawasan Kebangsaan di masa modern ini.

Perlu adanya kerjasama antara Orang tua, guru, tokoh masyarakat dan peran lembaga pemerintahan bahkan penegak hukum, dalam rangka pengembangan rasa cinta tanah air, bela Negara di kalangan para generasi muda, sehingga cita-cita bangsa yang sebenarnya dapat terwujud.

3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan antar ras, suku, etnis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dibentuk oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi Jambi sebagai salah satu wadah untuk menumbuhkan kebanggaan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jambi. Melalui Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi FPK

dalam meningkatkan cinta tanah air dan kebangsaan. Melalui forum ini diharapkan dapat menyamakan langkah persepsi dan pola pikir, pola sikap, pola tindak terhadap setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Guna menciptakan situasi aman, kondusif, tertib menuju Jambi MANTAP 2021-2026 dalam membangun Provinsi Jambi kedepan.

4. Pelaksanaan program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan Kesadaran Bela Negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara bagi generasi muda sehingga tumbuh rasa cinta tanah air dan patriotisme.

- PASKIBRAKA

Pembentukan Paskibraka merupakan turunan dari mandat Perpres Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Pembentukan Paskibraka mempunyai tahapan sebagai berikut :

(1) Rekrutmen dan Seleksi,

Proses Rekrutmen diperuntukan kepada setiap pelajar putra dan putri Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, dan/atau bentuk lain yang Sederajat yang memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai calon Paskibraka.

Proses Seleksi mempunyai tahapan secara umum yaitu Tes Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tes Pengamatan Fisik, dan Tes Wawancara

Memperhatikan fenomena permasalahan dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Paskibraka saat ini, salah satu Inovasi dalam program Paksibraka adalah melakukan "Transformasi Sistem Perekrutan dan Seleksi Paskibraka Nasional Berbasis Digital" melalui aplikasi transparansi Paskibraka. Website Paskibraka adalah sebuah sistem yang dibuat sebagai media

informasi dan juga pangkalan data untuk melaksanakan perekrutan dan seleksi Paskibraka

- (2) Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan, Pemusatan Diklat bertujuan untuk membentuk sikap para calon Paskibraka yaitu:
- a. Disiplin, menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan serta peningkatan wawasan kebangsaan;
 - b. Memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
 - e. Memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan.

Kurikulum Pemusatan Diklat

- a. PEMBELAJARAN AKTIF:
 - Pancasila;
 - Revolusi Mental;
 - Wawasan Kebangsaan;
 - Kewarganegaraan;
 - Kewaspadaan dan ketahanan nasional;
 - Literasi digital;
 - Kepaskibrakaan.
- b. PELATIHAN:
 - Latihan dasar kepemimpinan;
 - Peraturan baris-berbaris berdasarkan PERPANG;
 - Keterampilan dan praktik pengibaran/penurunan bendera.
- c. Pengasuhan Dengan Menggunakan Metode Desa Bahagia

- (3) Pengukuhan Paskibraka
 - a. Pengukuhan Tingkat Pusat di kukuhkan oleh Kepala BPIP
 - b. Pengukuhan Tingkat Provinsi di kukuhkan oleh Gubernur
 - c. Pengukuhan Tingkat Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota
- (4) Paskibraka mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus)
 - b. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni)
 - c. Tugas lain pada acara resmi lainnya yang ditetapkan oleh : Tingkat Pusat oleh Kepala BPIP, Tingkat Provinsi oleh Gubernur, Tingkat Kab/Kota oleh Bupati atau Walikota.
- (5) Tempat acara : kegiatan di dilaksanakan di Hotel Golden Harvest Jambi dan Lapangan Kantor Gubernur Jambi
- (6) Materi acara lainnya : materi acara lainnya berdasarkan wawasan kebangsaan dan di-isi oleh alumni alumni Lembaga Ketahanan Nasional
- (7) Peserta : Jumlah Paskibraka ialah 54 Tingkat Provinsi dan 2 Tingkat Nasional
- (8) Waktu acara :

Pembentukan panitia pelaksana pembentukan paskibraka	Januari
Sosialisasi dan Pengumuman : Penyebaran Informasi melalui media cetak/media elektronik/media sosial dan sosialisasi ke sekolah-sekolah	Januari - February
Rekrutmen dan Seleksi : Bimtek Aplikasi Transparansi bagi Admin dan Panitia Seleksi; dan Pelaksanaan Seleksi Tingkat Daerah	February - Mei
Pelaksanaan seleksi tingkat Pusat	February - Mei
Pemusatan Diklat di Daerah	Juli – Agustus
Pelaksanaan pengukuhan Paskibraka	Agustus

II. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Program ini memiliki dana yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar Rp.78.438.123.004,-. Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.78.434.008.454,-. Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yaitu terwujudnya situasi politik daerah yang kondusif. Pelaksanaan kegiatan politik diaplikasikan dalam kegiatan pendidikan politik dikalangan masyarakat, partai politik, ormas, mahasiswa/i, dan pelajar terutama pemilih pemula dan aparatur guna terselenggaranya politik yang santun, sehat dan berkualitas, rapat koordinasi dan pemantauan situasi perkembangan politik serta kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-Undang Politik.

Sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota sebagai berikut :

- a. Kab. Batanghari tanggal 14 Februari 2023 sebanyak 45 peserta yang terdiri dari pelajar MAN Batanghari, SMA Negeri 6 Batanghari, SMA Negeri 10 dan mahasiswa Universitas Graha Karya.
- b. Kota Sungai Penuh tanggal 11 Mei 2023 sebanyak 45 peserta terdiri dari GOW Kota Sungai Penuh, WPP, PPP, Dharma Yukhti kartini, PKK dan DWP Kota Sungai Penuh.
- c. Sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Jambi tanggal 22 Mei 2023, sebanyak 45 peserta terdiri dari pelajar SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 5 Kota Jambi, SMAN 4 Kota Jambi, SMAN 10 Kota Jambi, SMKN 3 dan mahasiswa UIN STS Jambi, Universitas NurdinHamzah, Poltekes, UNBARI.

- d. Sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan di Aula SMA Titian Teras Pijoan tanggal 30 November 2023, jumlah peserta 50 (lima puluh) orang terdiri dari pelajar SMA Titian Teras, MAN Cendekia, Mahasiswa UNJA dan UIN STS Jambi.

Hasil yang dicapai :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat/pemilih pemula dalam partisipasi politik di daerah.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada
3. Menurunnya angka pemilih yang golput dalam pemilu/pemilukada
4. Menurunnya pengaruhnya masyarakat terhadap money politik dan berita hoack.

2. Rapat Koordinasi Politik se Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023

Acara Rakor Politik dilaksanakan di aula Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dengan jumlah peserta 75 (tujuh puluh lima) orang, terdiri dari unsur Kesbangpol kab/kota, BPKAD kab/kota, KPU kab/kota, Bawaslu kab/kota se-Provinsi Jambi.

Hambatan/kendala :

- Masih minimalnya laporan kondisi politik daerah dari kab/kota.

Hasil dari kegiatan ini :

- a. Terhimpunnya laporan dan informasi-informasi perkembangan politik dari daerah kabupaten/kota.
- b. Terjadinya koordinasi/komunikasi langsung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Terlaksananya kerjasama dalam mengevaluasi dan merencanakan program kegiatan yang telah terlaksana dengan yang akan datang.

3. Kegiatan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2023

Bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 diberikan kepada 11 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan Total Alokasi Anggaran Bantuan Partai Politik Rp. 5.096.229.000,-

Rincian Bantuan Partai Politik Setiap Partai 2023:

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa: Rp. 544.314.000,-
- 2) GERINDRA.: Rp. 642.600.000,-
- 3) PDIP: Rp 792.096.000,-
- 4) Golkar: Rp 615.486.000,-
- 5) Nasdem: Rp 319.086.000,-
- 6) PKS: Rp 403.044.000,-
- 7) PPP: Rp 312.057.000,-
- 8) PAN: Rp 563.412.000,-
- 9) Hanura: Rp 166.551.000,-
- 10) Demokrat: Rp. 571.887.000,-
- 11) Bekarya.....: Rp. 165.696.000,-

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dicairkan berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor : 124/Bakesbangpol 2.1/II/2023 tanggal 13 Februari 2023. Dicairkan pada triwulan II karena masih menunggu verifikasi dari BPK RI tentang pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022.

4. Pemantauan Situasi Politik

Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk melakukan monitoring tahapan PEMILU dan PILKADA serta pemantauan situasi politik daerah, pelaksanaan di kab/kota se Provinsi Jambi.

Hambatan/kenda;a :

- Belum maksimalnya input data kesbangpol kab/kota yang diminta oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

5. HIBAH

Hibah uang kepada KPU, BAWASLU, dianggarkan pada DPA Badan Kesbangpol Provinsi Jambi langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

- Bawaslu Rp. 24.476.242.000,-
- KPU Rp. 48.456.212.000,-

6. IDI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi melaksanakan Rapat dengan Tim IDI Provinsi Jambi yang dibentuk melalui SK Gubernur Jambi Nomor 124/Bankesbangpol 2.1/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.

Hambatan/kendala :

1. TIM IDI Kesbangpol kab/kota belum terbentuk
2. Belum tersosialisasinya IDI kab/kota secara maksimal
3. Masih terbatasnya dukungan Anggaran Kegiatan IDI

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan yang dilaksanakan berupa ;

1. Pembinaan atau pengembangan SDM Pengurus Ormas

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Meningkatkan kualitas koodinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintah memfasilitasi, memberdayakan serta meningkatkan sarana koordinasi dan konsolidasi dalam penanganan Organisasi Kemasyarakatan.

b. Tujuan

Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Ormas dan LSM, bertujuan:

- 1) Untuk memonitor dan mengevaluasi keberadaan serta permasalahan-permasalahan Organisasi Kemasyarakatan di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi;
- 2) Adanya pembaharuan database berkaitan dengan perubahan kepengurusan dan jumlah keberadaan Organisasi Kemasyarakatan secara berkesinambungan;
- 3) Terjalinnnya kemitraan antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidag Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- 4) Meningkatkan Partisipasi dan peran Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya daam penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan dalam Negeri;
- 5) Terkelolanya hak dan kewajiban warga Negara dalam bersetrikat dan terkumpul;
 1. Terciptanya kesadaran kolektif warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memantapkan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
 2. Menjadi sarana konsolidasi antar unit kerja pemerintah nasional da daerah dalam penanganan masaah keormasan;
 3. Menyamakan persepsi dalam merespon hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Organisas Kemasyarakatan;
 4. Memperoleh data dan informas mengenai aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi;

Sasaran

Penanganan Organisasi Kemasyarakatan yang mendaftar pada Pemerintah (Badan Kesbangpol) Provinsi Jambi diharapkan dapat meningkatkan peran untuk memelihara Kesatuan Bangsa dalam bidang ideologi, Politik Ekonomi dan Sosial Budaya. Capaian keluaran yaitu tersusunnya Rekomendasi dan Dokumen Pelporan dalam rangka Pemantauan, evaluasi, Fasilitasi dan Koordinasi Ormas

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Tabel 3.6 Data Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Provinsi Jambi tahun 2023

No	Provinsi/Kab/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Ket
1	Provinsi Jambi	338	110	448	

Ormas yang mendaftar (SKT) pada Tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) Ormas.

Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi/seminar/dialog dll, dimana tahun 2023 dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan di Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerinci

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci di laksanakan pada hari Senin Tanggal 16 Februari 2023 di buka oleh Kaban Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan dihadiri oleh Kabid Fas OPK & LP Kesbangpol Provinsi Jambi, Kasubbid Organisasi Masyarakat LSM & Keagamaan Kesbangpol Provinsi Jambi beserta Staf dan para undangan bertempat di Ruang Aula Kesbangpol Kabupaten Kerinci, dengan peserta 50 (lima puluh) orang dari Organisasi

Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan Dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kerinci.

Narasumber :

1. Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi
2. KPU Kabupaten Kerinci
3. Kapolres Kabupaten Kerinci
4. Kabid Fas OPK & LP Kesbangpol Provinsi Jambi

Tema : **“Peran Ormas Dalam Mendukung Pilkada Serentak tahun 2024, Sehingga Terciptanya Pemilih Cerdas Di Provinsi Jambi”**

C. KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN ORMAS

Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi/seminar/dialog dll. Pada tahun 2023 ini ada 50 Ormas dan 1 ormas yang tidak menjalankan kegiatan, 49 ormas yang teranggarkan untuk kegiatan Kerjasama Ormas sebagai berikut :

No	Nama Ormas	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jam	Tema	Jumlah Peserta Peserta
1	Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Wilayah Jambi	Sabtu, 21 Oktober 2023	Gedung Mahligai (Bank Jambi)	Pagi	Mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas, berkeadilan, & berintegritas)	60 orang
2	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi	Sabtu, 21 Oktober 2023	Rumah Kebangsaan	Siang	Menakar Peran Pemuda Sebagai Agent Of Change and Control Menyambut Pemilu 2024	60 orang
3	FORMAPEK JAMBI	Senin, 23 Oktober 2023	Aula Kesabangpol Provinsi Jambi	Pagi	membentuk budaya anti korupsi demi	60 orang

					terciptanya generasi yang berintegritas	
4	Gerakan Anti Narkoba dan Zat Adiktif Nasional (GARNIZUN)	Kamis, 26 Oktober 2023	Aula Kesbangpol Provinsi Jambi	Siang	Bahaya Penggunaan, Peredaran Narkoba, Perdagangan Gelap Narkoba dan Zat Adiktif Serta Obat-obatan Terlarang di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	60 orang
5	Forum Peduli Remaja Jambi (FPRJ)	Kamis, 26 Oktober 2023	Diklat BPSDM kota baru	Pagi	Remaja Berkarakter, Cinta NKRI, Tolak Narkoba dan Radikalisme	60 orang
6	Serumpun Hijau Indonesia (SHN)	Jumat, 27 Oktober 2023	Aula Kesbangpol Prov. Jambi	pagi	Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Perspektif Ultimatum Remedium	60 orang
7	Senkom Mitra Polri	Jumat, 27 Oktober 2023	rumah makan magilan kota baru	pagi	Merajut Kebhinekaan Dan Persatuan Menuju Kamtibmas Jambi Mantap yang Lebih Kondusif	60 orang
8	Seikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)	Sabtu, 28 Oktober 2023	hotel cahaya prima	Pagi	Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Pekerja Migran dan Pengorganisasian BMI Jambi	60 orang

9	Gabungan Aksi Roda Dua Ojek Online Provinsi Jambi	Senin, 30 Oktober 2023	RM Dendeng Batokok 4	Siang	Peran Ojol Dalam HARKAMTIBN AS	60 orang
10	Penggiat Komponen Bela Negara (PKBN)	Selasa, 31 Oktober 2023	Gedung Maulana (cafe maulida)	Pagi	Sosialisasi 4 Pilar Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peningkatan Elektabilitas Pemilih di Pemilu 2024	60 orang
11	PAMMI	Rabu, 01 November 2023	aula kesbangpol	Pagi	Sosialisasi Pembinaan Akhlak Mulia Para Insan Pemusik Jambi	60 orang
12	Wanita Muda Wakarya	Rabu, 01 November 2023	aula kesbangpol	Siang	peran ibu rumah tangga dalam dunia politik	60 orang
13	Perkumplan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Provinsi Jambi (PIM)	Kamis, 02 November 2023	Pondok Indah Mahligai (PIM)	Pagi	Melalui Pelatihan Perempuan Indonesia Maju Kita Tingkatkan Kreatifitas Ekonomi Secara Mandiri	60 orang
14	Komunitas Muslimah Kreatif	Sabtu, 04 November 2023	lembaga adat kota jambi	Pagi	"Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Keluarga".	60 orang
15	BKPRMI	Sabtu, 04 November 2023	duta hotel	Siang	Meningkatkan Standar Kualitas Manajemen Organisasi Pemuda Remaja Masjid Dalam Mewujudkan	60 orang

					Beriman, Berakhlak, Bertakwa cerdas, Inovatif dan Kreatif	
16	Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aspirasi Nusantara (LAN)	Senin, 06 November 2023	Aula Kesbangpol Provinsi Jambi	pagi	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Pembangunan Nasional	60 orang
17	PNEKAD	Senin, 06 November 2023	Aula Kesbangpol Provinsi Jambi	siang	Perilaku Korupsi Dan Kenakalan Remaja Di Tanah Hukum Adat Melayu Jambi	60 orang
18	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Perangkai Bunga (DPD IPBI)	Selasa, 07 November 2023	Pondok Indah Mahligai (PIM)	Pagi	Melalui Lomba Seni Merangkai Bunga Kita Tingkatkan Kreatifitas Dan Cinta Flora Nusantara	60 orang
19	Konco Iamo Bersatu (KLB)	Rabu, 08 November 2023	Cahaya Prima Hotel	Pagi	Sosialisasi Koperasi di Kelurahan Kenali Asam Atas	60 orang
20	GM REBIDSI Jambi (Gerakan Muda Relawan Bina Demokrasi)	Jumat, 10 November 2023	aula kesbangpol provinsi jambi	Siang	Pelatihan kewirausahaan Digital dasar	60 orang
21	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Sabtu, 11 November 2023	Hotel Wiltop	Pagi	sosialisasi peningkatan kualitas akustik masjid	60 orang
22	Pembela Kesatuan Tanah Air Bersatu (PEKAT IB) Provinsi Jambi	senin, 13 November 2023	Aula Kesbangpol Provinsi Jambi	Pagi	PEKAT IB Ikut Serta Dalam Memperkuat Bela Negara	60 orang

23	Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia	selasa, 14 November 2023	Aula kesbangpol prov. jambi	Pagi	Melalui Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bimbingan Teknis Peningkatan Profesionalitas Guru Madrasah dalam Bingkai PGM Indonesia Se - Provinsi Jambi.	60 orang
24	HIMPAUDI	selasa, 14 November 2023	kajanglako	Pagi	Penguatan Keorganisasian HIMPAUDI	60 orang
25	peduli lingkungan jambi (PLJ)	selasa, 14 November 2023	Aula kesbangpol Prov. Jambi	siang	Focus Group Discussion Pentingnya Perizinan Lingkungan untuk Kegiatan Berusaha	60 orang
26	PWP-AI Jam'iyatul Washliyah	senin, 14 November 2023	Aula UIN Provinsi Jambi	Pagi	Optimalisasi Peran Ormas Islam Dalam Mengawali Politik Cerdas dan Santun Untuk Pemilu Damai	60 orang
27	ASPEDI	Rabu, 15 November 2023	Ev Garden	pagi	trend dekor 2024	60 orang
28	PWNA (Pimpinan Wilayah Nasyyiatul Aisyiyah) Jambi	Rabu, 15 November 2023	universitas muhamadiyah	Siang	meningkatkan peran pemilih pemula menuju	60 orang

					pemilu serentak 2024	
29	Pasundan	Kamis, 16 November 2023	gedung pasundan pematang sulur	siang	Tata Kelola Organisasi Masyarakat	60 orang
30	Perkumpulan Bonsai Kelapa Jambi	Jumat, 17 November 2023	aula kantor lurah sungai putri	Siang	seminar dengan tema Peningkatan Perekonomian dalam Ekonomi kreatif melalui budidaya Bonsai Kelapa tahun 2023.	60 orang
31	Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI)	Sabtu, 18 November 2023	hotel syariah samudra	Siang	Peran Pers Pada Pemilu 2024 Mengawal Nalar, Jujur, dan Inklusif	60 orang
32	PW BKMT	Senin, 20 November 2023	Hotel V Golden Harves	pagi	Tema tingkatkan kompetensi majelis taklim provinsi jambi	60 orang
33	Koalisi Perempuan Indonesia	Senin, 20 November 2023	shang ratu	pagi	ntingnya Peran Perempuan Dalam Menghadapi Pemilu 2024	60 orang
34	PW IPNU Jambi	Selasa, 21 November 2023	samudra hotel jambi	pagi	" Empat pilar kebangsaan sebagai aset pemersatu bangsa untuk pemuda yang kuat dan Indonesia yang berdaulat ".	60 orang
35	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)	selasa, 21 November 2023	Grand Hotel	siang	Kolaborasi Media Online Dan Pemerintah Ciptakan Pemilu	60 orang

					Damai Berkualitas	
36	FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI)	Rabu, 22 November 2023	Hotel Oduo Weston	pagi	dengan Judul : Sosialisasi Penguatan Organisasi dan Wawasan Kebangsaan, Tema : Melalui Penguatan Organisasi dan Wawasan Kebangsaan Kita wujudkan FKPPI Sebagai Kader Bangsa	60 orang
37	DPD KATALIA Provinsi Jambi (Asosiasi Ahli Rias pengantin Modifikasi & Modern Indonesia)	Rabu, 22 November 2023	ev garden	Siang	bimbingan teknis penguatan profesionalisme perias pengantin dan MUA untuk menuju Kompeten"	60 orang
38	DPD Pecinta Anggrek Indonesia (DPD PAI)	Kamis, 23 November 2023	kajang lako	Pagi	Sosialisasi Pelestarian Anggrek Alam dan Hibrida	60 orang
39	Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru	Kamis, 23 November 2023	hotel garden harvest	siang	Bahaya Narkoba Bagi Kemajuan Bangsa	60 orang
40	Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan Provinsi Jambi (PKPS)	Jumat, 24 November 2023	gedung sekretariat PKPS (dekat nurul ilmi 2)	siang	Optimalisasi Peran PKPS Dalam Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Jambi	60 orang

41	Bundo Kandung	Sabtu, 25 November 2023	kajang lako	pagi	Implementasi Nilai-Nilai Adat dan Budaya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Bersama Masyarakat Jambi	60 orang
42	Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN)	Sabtu, 25 November 2023	dinas sosial duckcapil	siang	kita Semua Setara Kesejahteraan Tuli Dapat Membuat Kita Saling Memahami Sesama	60 orang
43	DPD-Garda Relawan Indonesia (GARIS)	sabtu, 25 November 2023	Kenara di handil	siang	Pemilu Serentak dan Dinamika Sosial Politik Rakyat Jambi	60 orang
44	PPI Jambi	Senin, 27 November 2023	Hotel Shang Ratu	Pagi	Pentingnya Mengisi Masa Purna Bhakti Dengan Bebagai Kreativitas	60 orang
45	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	senin, 27 November 2023	Aula Universitas Muhammadiyah Jambi	siang	Pemilu 2024 Momentum Generasi Muda Berkontribusi Membangun Bangsa Demi Tercapainya Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila	60 orang
46	Perkopin	selasa, 28 November 2023	Pondok Indah Mahligai (PIM)	siang	Kewirausahaan Dan Permodalan	60 orang

47	Lembaga bantuan Hukum (LBH)	sabtu, 9 Desember 2023	Aula kesbangpol prov. jambi	pagi	Masa Depan CeraH Tanpa Narkoba Pilihan Bijak Generasi Milenial	60 orang
48	Parmusi	selasa, 12 Desember 2023	Aula kesbangpol prov. jambi	pagi	Tantangan remaja muslim menghadapi zaman dan teknologi	60 orang
49	purna paskibraka	Rabu, 20 Desember 2023	Aula kesbangpol prov. jambi	siang	Pedoman 4 Pilar Pancasila Dalam Kepaskibrakaan Dan Kehidupan Bermasyarakat	60 orang

Adapun ormas yang tidak melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

No	Nama Ormas	Keterangan
1	Pemuda Pancasila	Tidak Melaksanakan

1.2 Hambatan dan Solusi

Hambatan

- Tidak dapat melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan di beberapa kabupaten, dikarenakan anggaran yang terbatas sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
- Masih banyaknya Ormas yang belum melapor keaktifannya ke Badan Kesbangpol kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi maupun di Kesbangpol Provinsi Jambi sehingga masih ada Ormas yang tidak dapat dilibatkan dalam kegiatan pembinaan

- Masih sangat terbatasnya anggaran dana kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi, sehingga tidak semua Ormas yang bisa mendapatkan bantuan Kerjasama di Tahun 2023.

Solusi

- Kegiatan Pembinaan Tetap dilaksanakan dengan anggaran yang telah tersedia, namun demikian hasil yang dicapai dalam pembinaan ormas di Provinsi Jambi tetap maksimal.
- Badan Kesbangpol lebih aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diimbangi dengan adanya peningkatan dengan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Ormas sehingga Ormas yang ada di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dapat terpantau/terdeteksi secara dini segala bentuk kegiatan Ormas yang ada di Provinsi Jambi
- Menambah anggaran kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi, sehingga diharapkan semakin banyak lagi Ormas yang bisa mendapatkan bantuan Kerjasama di tahun selanjutnya.

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program ini dalam pelaksanaan adalah merangkum beberapa kegiatan sebelumnya dengan nama “*Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*” adapun kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 331.067.050,- dengan realisasi Rp. 330.045.550,- atau 99,69% dari kegiatan ini sesuai dengan perencanaan sudah dilakukan beberapa diantaranya :

a. Memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB

Forum ini sudah difasilitasi dengan mengadakan Rapat FKUB yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Peserta Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jambi tahun 2023 berjumlah 50 (lima puluh) orang terdiri dari seluruh anggota pengurus FKUB Provinsi Jambi dan seluruh anggota Dewan Penasehat FKUB Provinsi Jambi.

Maksud dan Tujuan :

Menyampaikan Visi, misi dan persepsi dalam meningkatkan peran FKUB, Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dan dewan penasehat FKUB untuk mengfungsikan FKUB dalam menciptakan kerukunan Intern dan unsure umat beragama di Provinsi Jambi, Mengkoordinasikan Kerjasama pemerintah dan FKUB dan Mengevaluasi Program kerja FKUB tahun 2023 dan menyusun Program kerja Tahun 2023.

Tujuan :

Dengan terbentuknya FKUB baik di Provinsi maupun Kabupten/kota dapat meningkatkan kerjasama Pemerintah dan FKUB serta memperoleh Informasi untuk penyelesaian masalah kerukunan umat beragama di provinsi Jambi serta mengevaluasi program kerja FKUB.

Narasumber :

- Ketua FKUB Provinsi Jambi, Prof. Dr. H.M. Hasby Umar, MA, .PH.D.
- Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, H. Zoztalia, S.Ag.M.Pd.I.
- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Drs. H. Apani Saharudin.

Kesimpulan Rapat FKUB :

1) Laporan Evaluasi Kinerja Pengurus FKUB Provinsi Jambi tahun 2023 berjalan sesuai dengan ketentuan dan TUPOKSI FKUB tidak ada kendala dan untuk program kerja tahun 2024 FKUB Provinsi Jambi akan mengadakan rapat pendalaman FKUB guna melaksanakan program prioritas FKUB tahun 2024 ke kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

2) Program Prioritas 2024

- Membangun Sinergitas
- Menjalankan Program FKUB

-Meningkatkan semangat toleransi.

3) Pengurus FKUB mengharapkan agar pada tahun tahun mendatang perwakilan Pengurus FKUB Provinsi Jambi dapat turun ke lapangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

b. Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika Provinsi Jambi Tahun 2023.

Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah memfasilitasi Rapat Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tingkat Provinsi Jambi pada tanggal 19 Juni 2023 di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Peserta Rapat berjumlah 50 (lima puluh) orang.

Maksud dan Tujuan :

Maksud :

Meningkatkan dukungan dan peran serta unit kerja pemerintah daerah (OPD) dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan masyarakat.

Tujuan :

Kegiatan Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Provinsi Jambi tahun 2023, bertujuan :

1. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika.
2. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi serta sinergitas antar unsur camat, kepala desa, pelajar, pemuda, mahasiswa dengan pemerintah daerah dalam rangka menyikapi ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peserta dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan keterpaduan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Narasumber terdiri dari :

1. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi
2. Direktur Resnarkoba Polda Jambi
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Kesimpulan :

1. Metode pencegahan melalui program P4GN ini merupakan metode yang paling efektif sebagai bentuk tindakan promotif dan preventif. Agar Tim Terpadu P4GN Tingkat Provinsi dan Pemerintah Daerah Tetap Optimal melaksanakan kegiatan pencegahan, memantau peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dalam Provinsi Jambi.
2. Segera mengirim surat kepada tim sesuai dengan SK Gubernur Jambi Nomor 291/KEP.GUB/BANKESBANGPOL4.1/2023, untuk mengambil langkah cepat dan tepat terhadap permasalahan narkoba sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta membuat himbauan berbentuk banner dan spanduk untuk menjauhi narkoba pada masing-masing OPD. Mendukung program Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tanggal 26 Juni 2023 yang dipusatkan di Provinsi Bali.

V. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

Pelaksanaan Program ini memiliki sasaran yaitu Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dengan total dana dalam Program ini berasal dari APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 2.267.559.000,- dengan di dukung Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.141.713.008,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Adapun output dari kegiatan ini adalah deteksi dini, cegah dini, tangkal dini dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya Konflik di Provinsi Jambi sehingga tercipta rasa aman dan tenteram dilingkungan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan konflik sosial tahun 2023.
- b. Sosialisasi Pencegahan Aktifitas PETI di Provinsi Jambi.
- c. Kegiatan FGD Penanganan Konflik sosial di Provinsi Jambi.
- d. Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Provinsi Jambi.
- e. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol kab/kota se- Provinsi Jambi di bidang Intelijen.
- f. FGD penyusunan rencana aksi penanganan konflik
- g. Kegiatan Pemantauan Orang Asing/NGO.
- h. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

Rapat Fokopimda Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Rakorda) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 Tahun dengan peserta 120 Orang dengan peserta unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaen Kota dan Para Perangkat daerah terkait.

Kesimpulan dan Kendala :

- Secara umum kegiatan bidang penanganan Konflik sudah telaksana sesuai rencana.

REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2023.

NO	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	MATERI ACARA	JUMLAH PESERTA	HAMBATAN/HASIL YANG DICAPAI
1	15 FEBRUARI 2023	AULA KESBANGPOL PROVINSI JAMBI	NGO (RAKER)	RAPAT KERJA PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING PROVINSI JAMBI TAHUN 2023	40 ORG	<p>HAMBATAN/ KENDALA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KOORDINASI ANTAR UNIT KERJA YANG MASIH RELATIF KURANG 2. DATA ORANG ASING YANG DIMILIKI BELUM LENGKAP 3. LAPORAN DARI MASING MASING UNIT KERJA TERLAMBAT/KURANG LENGKAP 4. ANGGARAN YANG TERSEDIA MASIH TERBATAS <p>HASIL YANG DICAPAI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TERCAPAINYA PEMAHAMAN YANG UTUH AKAN KEGIATAN PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING DI DAERAH 2. MENINGKATKAN SINERGITAS DAN KETRPADUAN KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING 3. MENINGKATKAN KUALITAS DATA TENTANG KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DI DAERAH 4. OPTIMALNYA PELAKSANAAN PEMANTAUAN TERHADAP KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING DI DAERAH
2	17 MARET 2023	AULA LT. 2 SASANA	FGD PENYUSUNAN RENCANA AKSI	PENYUSUNAN RENCANA AKSI TERPADU	80 ORANG	<p>HASIL :</p> <p>MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA KAB/KOTA TERKAIT</p>

		KEMENDAGRI	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
3	13-Apr-23	BALLROOM SWISS BELL HOTEL JAMBI	FORKOPIMDA	RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA SINERGITAS PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DENGAN FORKOPIMDA DALAM PENANGANAN ISU-ISU AKTUAL DIKAB/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI DAN PENGAMANAN HARI RAYA IDUL FITRI 144 H / 2023 M	120 ORG	HASIL YANG DICAPAI : 1. MENINGKATKAN SINERGITAS PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT SERTA PENANGANAN ISU ISU AKTUAL DI KAB/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI 2. TERJALINYA KERJASAMA YANG TERARAH TEPAT GUNA DAN BERDAYA GUNA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN FORKOPIMDA 3. MEMBINA DAN MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
4	22 MEI 2023	KOTA SUNGAI PENUH	FKDM	SOSIALISASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI CEGAH DINI DAN DETEKSI SEKALIGUS KONSOLIDASI FKDM SERTA PEMBENTUKAN FKDM KECAMATAN	50 ORG	
5	23 MEI 2023	MERANGIN	FKDM	SOSIALISASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI CEGAH DINI DAN DETEKSI SEKALIGUS KONSOLIDASI FKDM SERTA PEMBENTUKAN FKDM KECAMATAN	50 ORG	

6	24 MEI 2023	BUNGO	FKDM	SOSIALISASI KEGIATAN RADIKALISME DAN TERORISME DI KALANGAN SISWA/I, MAHASISWA/I TENAGA PENDIDIK DAN TOKOH MASYARAKAT	80 ORG	SOSIALISASI RADIKAL PERLU PENAMBAHAN KEGIATAN
7	25 MEI 2023	TEBO	FKDM	SOSIALISASI KEGIATAN RADIKALISME DAN TERORISME DI KALANGAN SISWA/I, MAHASISWA/I TENAGA PENDIDIK DAN TOKOH MASYARAKAT	80 ORG	SOSIALISASI RADIKAL PERLU PENAMBAHAN KEGIATAN
8	21 S.D 23 JUNI 2023	YELLO HOTEL	KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KESBANGPOL KAB/KOTA SE-PROVINSI JAMBI DIBIDANG INTELIJEN	MATERI INTELIJEN DASAR	60 ORG	HASIL : MEMBERIKAN WAWASAN KEPADA APARATUR KESBANGPOL KAB/KOTA TERKAIT INTELIJEN DASAR
9	20 JULI 2023	AUDITORIUM RUMAH DINAS GUBERNUR JAMBI	FKDM (RAKOR)	RAPAT KOORDINASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT SE PROVINSI JAMBI DENGAN TEMA PENGUATAN KELEMBAGAAN FORUM KEWASPADAAN DINI	80 ORG	

				MASYARAKAT PROVINSI JAMBI DAN KABUPATEN KOTA SE- PROVINSI JAMBI		
10	31 JULI 2023	AULA KESBANGPOL PROVINSI JAMBI	FGD PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI JAMBI	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KAB/KOTA SE-PROVINSI JAMBI	80 ORG	HASIL : MEMFASILITASI PENANGANAN KONFLI SOSIAL DI KAB/KOTA SE-PROVINSI JAMBI
11	29 AGUSTUS 2023	AULA BPKPD KAB. BATANGHARI	SOSIALISASI PENCEGAHAN AKTIFITAS PETI DI PROVINSI JAMBI	PERAN SEMUA ELEMEN DALAM PENCEGAHAN PETI DI PROVINSI JAMBI	80 ORANG	HASIL : MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA STAKE HOLDER TERKAIT DAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PETI
12	31 AGUSTUS 2023	AULA BAPPEDA KAB. BUNGO	SOSIALISASI PENCEGAHAN AKTIFITAS PETI DI PROVINSI JAMBI	PERAN SEMUA ELEMEN DALAM PENCEGAHAN PETI DI PROVINSI JAMBI	80 ORANG	HASIL : MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA STAKE HOLDER TERKAIT DAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PETI

13	27-Sep-23	AULA KESBANGPOL PROVINSI JAMBI	NGO (RAKOR)	RAPAT KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 DENGAN TEMA SINERGITAS APARATUR DALAM PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING DIDAEARAH	50 ORG	<p>HAMBATAN/ KENDALA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KOORDINASI ANTAR UNIT KERJA YANG MASIH RELATIF KURANG 2. DATA ORANG ASING YANG DIMILIKI BELUM LENGKAP 3. LAPORAN DARI MASING MASING UNIT KERJA TERLAMBAT/KURANG LENGKAP 4. ANGGARAN YANG TERSEDIA MASIH TERBATAS <p>HASIL YANG DICAPAI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MENGEFEKTIFKAN WADAH TIM KOORDINASI YANG TELAH DIBENTUK BAIK SEBAGAI WADAH TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR TIM KOORDINASI PROVINSI JAMBI DENGAN TIM KOORDINASI KAB/KOTA SE-PROVINSI JAMBI 2. TERJALINYA KERJA SAMA YANG TERARAH TEPAT GUNA DAN BERDAYA GUNA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDATAAN TERHADAP KEBERADAANDAN AKTIFITAS ORANG ASING DI DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 3. MENYAMPAIKAN VISI, PERSEPSI DAN SIKAP ANGGOTA TIM POA DI KAB/KOTA SE PROV JAMBI DENGAN MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 49 DAN 59 TAHUN 2010
14	12 OKTOBER 2023	AULA KESBANGPOL PROVINSI JAMBI	FKDM (RAKOR)	RAPAT KOORDINASI TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI	80 ORG	

15	18 - 19 OKTOBER 2023	AULA BADAN KESBANGPOL PROV JAMBI	RAPAT KOORDINASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2023	PERAN TIMDU DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI JAMBI	100 ORG	HASIL : TERJALINNYA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTARA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI JAMBI DAN KAB/KOTA SE-PROV JAMBI
16	26 OKTOBER 2023	GEDUNG MAHLIGAI 9 JAMBI	FORKOPIMDA	RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA SINERGITAS PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DENGAN FORKOPIMDA DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN TAHUN 2024 SERTA PENANGANAN ISU-ISU AKTUAL DI KAB/KOTA	120 ORG	HASIL YANG DICAPAI : 1. MENINGKATKAN SINERGITAS PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT SERTA PENANGANAN ISU ISU AKTUAL DI KAB/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI 2. TERJALINYA KERJASAMA YANG TERARAH TEPAT GUNA DAN BERDAYA GUNA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN FORKOPIMDA 3. MEMBINA DAN MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.
17	15 DESEMBER 2023	AUDITORIUM RUMAH DINAS GUBERNUR JAMBI	FORKOPIMDA	RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA SINERGITAS PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DENGAN FORKOPIMDA DALAM RANGKA PERSIAPAN PENGAMANAN NATAL TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024 SERTA PENANGANAN ISU-ISU AKTUAL .	120 ORG	HASIL YANG DICAPAI : 1. MENINGKATKAN SINERGITAS PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT SERTA PENANGANAN ISU ISU AKTUAL DI KAB/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI 2. TERJALINYA KERJASAMA YANG TERARAH TEPAT GUNA DAN BERDAYA GUNA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN FORKOPIMDA 3. MEMBINA DAN MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

BAB IV

PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah telah berhasil melakukan berbagai program dalam upaya menetapkan dan mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat untuk menuju Jambi MANTAP.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah "Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis", dengan indikator Indeks Aspek Kebebasan Sipil, Persentase Ormas aktif, Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi, realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebesar 100%.
2. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti masih belum validnya tapal batas antar desa maupun kecamatan, dan tapal batas lahan baik punya perorangan maupun perusahaan yang cepat sekali menyulut konflik di masyarakat. Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti permasalahan tapal batas untuk diatur secara tegas yang dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Kebijakan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komitmen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
- b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dapat tercapai.
- c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government.

Demikian Laporan kinerja (LKj) Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2023, pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dapat dipertahankan untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasa yang akan datang.

Jambi, Januari 2024

KEPALA BADAN

Drs. H. APANI SAHARUDIN

Pembina Utama Madya

NIP. 19680603 198810 1 001

KATA PENGANTAR

Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik telah di susun dokumen rencana Strategis dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan visi dan misi Gubernur Jambi, Terwujudnya Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (Jambi Mantap) dengan Misi ke 3 (tiga) Memantapkan Kualitas SDM "MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI YANG DINAMIS".

Badan Kesatuan dan Politik memiliki peran penting dalam Menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya Provinsi Jambi dalam upaya mempertahankan Kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kehidupan demokrasi di Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah di daerah dibidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan, Penanganan konflik, Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja Ini dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Jambi, Januari 2024

KEPALA BADAN

Drs. H. APANI SAHARUDIN

Pembina Utama Madya

NIP. 19680603 198810 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2023 berupa Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi dari Pemerintah Pusat Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Piagam Penghargaan Pembagian 10 Juta Bendera di Provinsi Jambi

Dasar: Surat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 200.2.3/e-123/Polpum tanggal 2023
Pelaksanaan: Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan Piagam Penghargaan berhasil mendukung program Kementerian Dalam Negeri Terkait Pembagian 10 Juta Bendera bagi masyarakat di Wilayah Provinsi Jambi yang diikuti oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi.

2. Sertifikat Penghargaan Top II Satuan Kerja Jumlah Transaksi Terbanyak

Diselenggarakan oleh PT. Affan Technology Indonesia (Parto.id)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Mendapatkan Penghargaan Top II Satuan Kerja Jumlah Transaksi Terbanyak, dinilai telah berhasil mendukung program Pemerintah Provinsi dalam pengembangan ekonomi digital di Jambi.

Penerimaan Sertifikat/Penghargaan dalam kegiatan Gerakan Pembagian 10
Juta Bendera Merah Putih Tahun 2023





Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan setiap tahunnya yang secara rinci akan dijabarkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 ini.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 31.728.494.193,- yang selanjutnya mengalami perubahan tertuang dalam DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar Rp. 102.378.640.807,- (Seratus Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 7.544.477.572,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 15.971.102.375,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
3. Belanja Hibah Rp.78.128.683.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 234.377.860,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
5. Belanja Modal Gdng dan Bangunan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan.

Sebagai upaya mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke depan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan komitmen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
- b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dapat tercapai.
- c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini disusun, untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	3
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3 Isu Strategis	15
1.4 Sumber Daya Aparatur	16
1.5 Sarana dan Prasarana	19
1.6 Keuangan	241
1.7 Sistematisasi Penyusunan LKj Tahun 2023	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1 Perencanaan Strategis	24
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	24
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	26
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	31
3.3 Realisasi Anggaran	35
3.4 Laporan Hasil Kegiatan dan Realisasi Kegiatan T.A. 2023.....	51
BAB IV PENUTUP	61

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1 Struktur Organisasi.....	4
Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai	17
Gambar.1.3 Golongan Ruang Pegawai	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai.....	16
Tabel 1.2 Golongan Ruang Pegawai	18
Tabel 1.3 Rekapitulasi Barang Inventaris	19
Tabel 1.4 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana	20
Tabel 1.5 Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	20
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	26
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026.....	27
Tabel 2.3 Formulir Perjanjian Kinerja OPD	28
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel 3.2 Capaian Kinerja.....	31
Tabel 3.3 Capaian Kinerja 2020-2023	32
Tabel 3.4 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah.....	34
Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2023.....	36
Tabel 3.6 Data Organisasi Kemasyarakatan.....	55